

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Karena organisasi sektor publik yang paling utama adalah Pemerintah, maka akuntansi sektor publik juga dapat dinyatakan sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun Pemerintah Daerah. Penerapan mekanisme akuntansi pada Organisasi Pemerintahan bukan berarti bahwa akuntansi organisasi komersial sepenuhnya diterapkan pada organisasi Pemerintah. Karena perbedaan sifat, tujuan, lingkungan, dan standar akuntansi, maka penerapan akuntansi pada Organisasi Pemerintahan berbeda dibandingkan dengan penerapan akuntansi pada Organisasi perusahaan (Siregar:2015). Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purposive activity*).

Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai akuntansi yang digunakan pada sektor swasta maupun sektor publik yang berbeda. Dari perspektif ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yaitu aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan perspektif ilmu ekonomi tersebut, tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.

Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya (Haryanto dkk: 2007).

Dalam perkembangan kegiatan Pemerintah atau dikenal dengan Akuntansi Sektor Publik dan perkembangan organisasi non laba saat ini terus meningkatkan beriringan dengan perkembangan kegiatan pembangunan, globalisasi, dan era reformasi. Era reformasi membawa dampak adanya tuntutan akuntabilitas publik (publik accountability) dan tuntutan keterbukaan (transparancy) dalam perombangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menurut pemerintah melakukan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya (Putu dan Indraswarawati, 2021). Kinerja Pemerintah dapat dikatakan baik biasa dilihat dari pencapaian hasil kinerja yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal serta tercapai sesuai dengan visi dan misi Organisasi yang telah ditetapkan. Di Indonesia, suatu Daerah diberikan kewenang untuk mengelolah sendiri Daerahnya yang disebut dengan otomi Daerah. Kepercayaan atas pengelolaan Daerah ini menjadikan kinerja dalam pelaksanaan Pemerintah menjadi sorotan publik.

Suatu Daerah dapat dikatakan mandiri jika mampu menyelenggarakan pemerintah didaerahnya atau mampu menyelenggarakan otonomi Daerah yang baik memiliki ciri dan kemampuan dibidang keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 tentang pengelolaan keuangan Daerah mendefinisikannya sebagai semua aktivitas atau kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Daerah.

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang berupa sikapnya, perilaku, ataupun pengetahuan. Mardiasmo (2021) mengemukakan bahawa pembuatan laporan keuangan akan lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila sumber daya manusia mampu. Hal ini disebabkan adanya ilmu pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman yang dimiliki terhadap sesuatu yang harus dikerjakan. Sehingga dapat menghasilkan dan menyajikan pelaporan keuangan dengan tepat waktu, kemudian informasi tersebut dapat diambil dalam mengambil keputusan.

Suryani dan Robinsyah (2022) menyatakan bahwa dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka akan berdampak pada kinerja keuangan daerah yang baik pula. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kewajiban bagi instansi Pemerintah, sehingga dapat diketahui kinerja instansi tersebut. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, setiap instansi diharapkan dapat terhambar kondisi mistimes instansi tersebut. Pengelolaan keuangan Daerah yang baik mempunyai pengaruh dalam meningkatkan kinerja suatu instansi atau Organisasi Suryana, (2017). Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik. Selain akuntabilitas, transparansi juga merupakan hal penting dalam tercapainya kinerja yang baik

Menurut Edowati, (2021) transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada Masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluru

atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatan pada peraturan per Undang-Undangan.

Suatu istilah Pemerintah dapat dikatakan transparan apabila menyelenggarakan Pemerintah dapat diakses dan diketahui dengan mudah oleh Masyarakat sehingga Masyarakat bisa menyelesaikan dan mengevaluasi kinerja Pemerintah (Laga dan Hidayat, 2021).

Pengelolaan keuangan Pemerintah telah banyak mengalami perubahan dari berbagai perspektif dan ruang lingkupnya. Siklus pengelolaan keuangan mulai dari pencatatan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban telah mengalami lapangan (Kemendagri, 2006) Perubahan ini merupakan sesuatu yang bersifat keniscayaan. Hal ini karena Pemerintah sejak kemerdekaan hingga periode Tahun 200-an belum melakukan perubahan regulasi. Pengelolaan keuangan pemerintah telah berubah dari modal administrasi menjadi manajemen saintifik. Hal ini diceritakan bahwa pemerintah Indonesia telah menggunakan akuntansi dalam proses pelaporan keuangan sebagai wujud akuntabilitasnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Billy Rivaldy Pangalila, Sifrid S. Pengemanan, Jessy D. L. Waronggan (2016) yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasan Tenggara.

Berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul” **Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Alor**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian yaitu Analisis penerapan akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan pada Kantor Keuangan Daerah Kabupaten Alor.

1.3 Persoalan Penelitian

Bagaimana penerapan akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Alor?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Alor.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Kemanfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan penambahan wawasan pengetahuan khususnya pengetahuan mengenai penerapan akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan Daerah.

2. Kemanfaat Praktis

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan informasi tentang penerapan akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan Daerah.